

TAU TAA WANA, DARI ALAM UNTUK ALAM: Filosofi dan Praktik Bijaksana Menata Relasi Manusia dan Alam

Moh. Nutfa
Peneliti Sosial di Sulteng
moh.nutfa@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang Tau Taa Wana Filosofi dan Praktik Bijaksana Menata relasi Manusia dan Alam Praktik-praktik sosial budaya Suku Taa berbentuk pola-pola sikap perilaku pemanfaatan hutan dan lahan yang sejalan dengan nilai-nilai pengetahuan lokalnya, seperti pembagian kawasan berdasarkan peruntukan dan kebutuhan komunal. Sementara kehidupan agraris nomaden yang diperhadapkan dengan tekanan-tekanan struktural seperti tekanan swasta dan kebijakan yang belum sepenuhnya memihak mereka.

Kata Kunci: *Tau Taa Wana, Alam, Manusia dan Alam*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Salah satu etnik di Sulawesi Tengah yang menarik banyak perhatian khususnya peneliti dan lembaga swadaya masyarakat (LMS) terutama menyangkut persoalan sosial, ekonomi dan budaya, adalah Suku *Tau Taa Wana Posangke* atau biasa di sebut *Wana Posangke*. Suku *Wana Posangke* adalah komunitas yang berada dibagian selatan semenanjung timur pulau Sulawesi yang mendiami lembah dan bukit-bukit disepanjang aliran Sungai Salato bagian Timur Laut Cagar Alam Morowali Sulawesi Tengah. Suku ini melabelkan diri dan identitasnya sebagai “Orang/Suku *Taa*”. Namun kalangan luarlah baik aktivis, pemerintah, peneliti, misionaris, dan lainnya lebih terbiasa menyebut “orang *Wana*”. Namun penulis kemudian lebih memilih menggunakan istilah sesuai dengan penyebutan mereka, yaitu “Suku *Taa*”.

Pada awalnya Suku *Taa* sama sekali tidak mengenal istilah masyarakat ataupun komunitas adat, hutan adat, hukum adat, lembaga adat atau sejenisnya. Bagi Suku *Taa* mereka adalah sekumpulan orang yang menghuni kawasan hutan yang mereka sebut

“*Pangale*” dimana kehidupannya diatur kedalam standar moral dan tatakrma bertingkah laku. Pasca keruntuhan rezim Orde Baru, tepatnya ketika ada intervensi (pemberdayaan) masuk dikomunitas ini, barulah mereka mengenal istilah-istilah itu.

Suku Wana sering disebut juga dengan *Tau Taa Wana* yang berarti "orang yang tinggal di hutan". Namun mereka juga suka menyebut diri sebagai *Tau Taa*, atau "orang Taa". Suku Wana berbicara dalam bahasa Taa. Dilihat dari bahasa yang digunakan oleh Suku Wana ini, mereka memiliki kemiripan bahasa dengan Suku Taa yang berada di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Tojo Una-Una. Suku Wana atau suku To Wana ini termasuk suku tertua di Sulawesi, diduga termasuk salah satu suku pertama yang menghuni daratan Sulawesi, yang telah ada di Sulawesi sejak 8000 tahun yang lalu pada zaman Meolithicum. Sebelum sekarang mendiami kawasan Pegunungan Tokala, nenek moyang orang Wana berasal dari sekitar Teluk Bone.

Tulisan ini merupakan hasil riset empiris yang dilakukan penulis terutama ketika kerjasama riset aksi diselenggarakan oleh Yayasan Merah Putih (YMP) Sulteng pada komunitas *Wana Posangke* di Kabupaten Morowali Utara Sulawesi Tengah tahun 2018. Hal menarik yang diangkat dalam tulisan ini adalah tentang kehidupan Suku *Taa* didataran tinggi ini yang masih memiliki pola hidup sahaja dan menghargai alam meskipun tengah berhadapan dengan arus perubahan sosial. Mereka mengambil dan memanfaatkan segala sesuatunya dari alam lalu mengembalikannya kepada alam berdasarkan pengetahuan, sikap dan perilaku bijaksana dalam relasinya dengan alam disekitarnya.

1.2. Fokus Kajian

Tulisan ini terfokus pada praktik-praktik sosial budaya Suku *Taa* dan filosofi ekosentrisme yang mendasari interaksi mereka dengan alam. Meski seringkali dianggap sebagai masyarakat terasing dan tertinggal dari peradaban modern, namun Suku *Taa* tidak lagi menutup diri. Mereka masih konsisten menjalani nilai-nilai tradisi leluhurnya ditengah tantangan perubahan sosial.

1.3. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik-praktik sosial budaya Suku *Taa* dan filosofi yang mendasari praktik-praktik tradisional mereka. Disamping itu, juga mendeskripsikan tentang kehidupan sahaja Suku *Taa* yang diperhadapkan dengan tekanan struktural dimana negara dan swasta justru menjadi ancaman bagi ruang hidup mereka.

2. Metode

Penelitian dilakukan di awal tahun 2018 pada komunitas *Wana Posangke* (Suku *Taa*) di dataran tinggi Desa Taronggo Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Unit analisis adalah Suku *Taa* yang tersebar di tiga pemukiman (Sumbol, Salisarao dan Viautiro). Informan

sebanyak 12 orang terdiri dari kepala adat/suku, kepala kampung, tokoh perempuan, tokoh komunitas, tokoh pemuda dan aktor LSM pendamping. Keseluruhan informan dipilih atas pertimbangan peneliti (*purposive sampling*), yaitu berdasarkan kategori pengetahuan, usia, dan kesiapan informan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan pengamatan dan dianalisis secara kualitatif.

3. Pembahasan

3.1. Asal Usul Suku Taa

Asal-usul Suku *Taa* berdasarkan mitologi mereka, diceritakan berasal dari sebuah tempat yang dalam bahasa lokal di sebut "*Tundantana*" yang berarti tempat pertama manusia menginjakkan kaki di bumi (tempat ini telah masuk dalam kawasan Cagar Alam Morowali). Manusia pertama Suku *Taa* mereka sebut *Pue Pololoisong* dan adiknya *Ade Banggai* (mereka yakini sebagai Raja Banggai (Andika, 2014: 6).

Kedua kaka beradik itu menjadikan mereka hidup secara turun-temurun dan tersebar diberbagai wilayah di Sulawesi Tengah. Ketika dewasa keduanya memiliki keyakinan agama berbeda. *Pue Pololoisong* memiliki kepercayaan religius yang mereka sebut "*Halaik*", sedangkan sang adik, *Ade Banggai* memilih memeluk agama Islam. Meskipun berbeda keyakinan namun keduanya tidak berselisih pendapat, hidup tentram serta saling menghargai keyakinan (Zaiful, 2015:1).

Sebagaimana suku-suku pedalaman lainnya, suku Wana juga menjalankan pola hidup yang terkait dengan menjaga keharmonisan hubungan dengan para leluhur mereka. Dalam keyakinan suku Wana, yang menjadi unsur penting pertama dalam hidup mereka adalah tanah karena tanah (*tana poga'a*) diciptakan oleh *Pue* (Tuhan) yang menjadi tempat hidup leluhur pertama mereka. Unsur penting kedua adalah pohon yang berfungsi sebagai perekat tanah leluhur. Menurut mereka, "*Kaju kele'i* dan *kaju paramba'a* adalah kayu yang sengaja ditanamkan oleh *Pue* (Tuhan) tidak saja untuk melindungi leluhur suku Wana, tetapi juga untuk mengikat tanah leluhur atau "*tana ntautua*" agar kuat dan terus menyatu. Satu komponen lagi yang menurut suku Wana harus dilindungi adalah sungai. Pohon-pohon besar (*kaju*), tanah (*tana*), dan sungai (*ue*) adalah kesatuan yang saling terkait. Kesatuan itulah yang oleh suku Wana kemudian disebut sebagai hutan atau *pangale*. Jika salah satu unsur *pangale* tersebut dirusak, keseimbangan kesatuan tersebut akan rusak. Untuk itu, menurut keyakinan suku Wana, jika manusia ingin kehidupannya di dunia ini terhindar dari bencana, mereka harus mampu menjaga kelestarian *pangale*-nya.

Kehidupan Suku *Taa* tidak menetap. Hidup berpindah-pindah (nomaden) mengharuskan Suku *Taa* bermigrasi keberbagai wilayah sambil berladang terutama menuju aliran Sungai Bongka (Kab. Tojo Una Una) lalu sampai pada Sungai Salato (Kab. Morowali

Utara). Di wilayah sungai Salato itulah Suku Taa mulai tinggal menetap hingga akhirnya menjadi sub-etnik *Tau Taa Wana* atau *Wana Posangke* (Andika, 2014: 6; Zaiful, 2015: 2).

Sedangkan riset empiris ilmuan Belanda, Albert Christian Kruyit pada 1930, menurutnya berdasarkan pola penyebaran, Suku *Taa* dikelompokkan kedalam empat sub-etnik berdasarkan dialek bahasa, yaitu: (1) Etnik *Tau Burangas*; (2) Etnik *Tau Kasiala*; (3) Etnik *Tau Posangke*; dan (4) Etnik *Tau Untunu Ue*.

Berdasarkan studi empiris Cruyt, maka Suku *Wana Posangke* adalah bagian dari salah satu suku di Kabupaten Poso yaitu Suku *Pamona*. Serupa dengan hasil studi Jane Monning Atkinson bahwa Suku *Taa* merupakan sub-etnis dari kelompok etnolinguistik Suku Pamona yang sebagian besar dan sejak lama mendiami wilayah-wilayah di sekitar Sungai Bongka, Ulu Bongka, Bungku Utara dan Barong (Zaiful, 2015: 2-3).

3.2. Filosofi Hidup Suku *Taa*

“Tana ntau tua mami, retu sekatuvu mami nempo masiasi ree tana mami”. Artinya “tanah leluhur kami, biar hidup sederhana asalkan di tanah kami”. Begitulah prinsip hidup Suku *Taa*, menurut mereka tanah adalah segalanya sebab dari tanahlah segala sumber kehidupan hadir dan dinikmati. Tanah bagi mereka adalah orang tua dan titipan sejarah yang mesti mereka jaga sepenuh hati sehingga pantang bagi Suku *Taa* untuk menjual tanah.

Tanah bagi mereka merupakan sumber daya komunitas sekaligus unsur vital dalam kelangsungan hidup mereka. Tidak penting mengenai nasib kehidupan sebagaimana masyarakat modern yang cenderung materialistik. Bagi Suku *Taa* kehidupan sahaja aalah sebuah keistimewaan. Kehidupan mereka dilandasi oleh budaya (adat-istiadat dan norma sosial) maupun dari sumber daya alam (tanah, sungai dan hasil hutan) sebagai kekayaan alami.

Namun, perubahan sosial yang diiringi dengan masuknya orang-orang luar komunitas (*out-group*) di wilayahnya turut menjadi satu persoalan baru bagi Suku *Taa*, terutama ketika masuknya industri perkebunan sawit. Masuknya *out-group* diwilayah mereka telah menumbuhkan nafsu kepenguasaan dari *out-group* terhadap sumber tanah-tanah yang dimiliki Suku *Taa*. Sementara, disaat bersamaan mereka belum memiliki kesiapan mental untuk menerima perubahan sosial. Disaat itulah mereka diklaim oleh kalangan luar sebagai kelompok marginal dan terbelakang dari kehidupan modern.¹

Belakangan baru diketahui bahwa sesungguhnya masalah fundamental yang mereka hadapi adalah ketidakberdayaan komunitas dalam menghadapi tekanan ekonomi politik ditingkat lokal, terutama terbatasnya akses pendidikan.

¹ Bahkan seringkali orang luar (*out-group*) melabelkan masyarakat orang *Taa* sebagai “orang bodoh”.

3.3. Kebudayaan, Ruang Hidup dan Pengakuan

Hidupnya kelembagaan adat ditengah komunitas merupakan bukti lestarnya kebudayaan Suku *Taa* ditengah derasnya arus perubahan sosial saat ini. Kelembagaan adat pada suku ini sangat dihargai dan berpengaruh terhadap dinamika kelompok. Penerapan hukum adat sebagai standar perilaku (norma) fungsional terhadap keseimbangan relasi sosial diantara mereka, maupun relasinya dengan alam. Adapun struktur kelembagaan adat Suku *Taa* yang eksisting yaitu:

- 1) *Tau Tua Lipu*. Yaitu seorang pemimpin adat dengan berkedudukan sosialnya sebagai kepala kepala kampung (*lipu*) untuk mengurus berbagai persoalan sosial komunitasnya.
- 2) *Tau Tua Ada*. Yaitu kepala hukum adat di kampung dengan peranan adalah menegakkan, memutuskan dan menetapkan sanksi adat (*givu*).
- 3) *Worotana*. Yaitu seseorang yang memimpin pelaksanaan adat pertanian untuk urusan penentuan lokasi lahan, pembukaan lahan, sampai pada penanaman padi pertama.
- 4) *Tau Valia*. Yaitu seseorang yang memimpin pelaksanaan ritual pengobatan penyakit atau seseorang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang penyembuhan penyakit.

Adapun keberlangsungan sistem tenurial pada Suku *Taa* diantaranya: (1) secara ekonomi tanah dan hutan bermanfaat secara langsung terutama sebagai sumber penghidupan sehari-hari, seperti mengambil gatah kayu damar dan rotan untuk di jual kepasar lokal; (2) secara sosial bahwa perilaku terhadap lingkungan alam adalah perilaku peduli dengan lingkungan hidup, karena memiliki norma adat tentang perilaku menghargai sesama makhluk hidup; dan (3) secara ekologis perilaku Suku *Taa* memperlihatkan relasi santun dan harmoni terhadap alam. Mereka memposisikan kedudukan alam semesta sebagaimana mereka memperlakukan diri sendiri. Mereka memandang bahwa diri mereka bukanlah penakluk alam, melainkan sahabat sekaligus bagian dari alam.

Alam bagi Suku *Taa* memiliki makna simbolik. Gunung dimaknai sebagai raga dan sungai sebagai jiwa. Hutan memiliki nilai ekosentrisme, yaitu keselarasan relasi antara manusia dan alam semesta (Camang, 2003: 35). Aktifitas sehari-hari Suku *Taa* adalah bertani dengan ciri khas berladang pindah, meskipun sudah banyak dari mereka yang berladang menetap.

Secara ekosentris, prinsip hidup mereka adalah menyetarakan diri dengan alam. Mereka memandang bahwa alam tercipta bukan untuk dirusak demi kepentingan manusia, namun sebagai unsur yang hanya memenuhi kebutuhan manusia secara bijak sehingga harus

diperlakukan secara bijak pula. Pola hidup Suku *Taa* sangat sahaja. Mereka tidak memiliki ambisi untuk penguasaan lahan sebanyak-banyaknya, melainkan sekadar yang dibutuhkan untuk pengelolaan ladang secukupnya. Berladang pindah adalah aktivitas vital mereka selain tradisi berburu dan meramu.

Sebagai suku di Sulawesi Tengah, dasar hukum pengakuan legal Suku *Taa* termuat dalam UUD 1945 dan lembar kebijakan negara diantaranya:

1. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012 yang mengakui bahwa hutan adat bukan hutan negara dengan implikasi bahwa negara mengembalikan hutan adat kepada masyarakat adat;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 13 tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat *Suku Wana* di Kabupaten Morowali.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak. Artinya bahwa pengakuan negara terhadap hutan adat telah nyata.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, mengenai perhutan sosial, dengan juga menekankan aspek pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat yang menetap didalamnya.
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK. 6747/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/16, yang menetapkan hutan adat Wana Posangke seluas ± 4.660 Ha di Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara.

3.4. Tantangan Perubahan Sosial

Meskipun hidup ditengah harmonisasi dengan alam namun Suku *Taa* diperhadapkan dengan arus perubahan sosial yang berlangsung cepat dan bermata dua. Disatu sisi memberikan dampak positif, disisi lain dapat menghancurkan struktur sosial. Saat ini Suku *Taa* sedang menghadapi berbagai tekanan struktural, dimana terdapat dua ancaman terbesar, yaitu: (1) konflik dengan pihak swasta (kapitalis) yang melakukan upaya ekspansi perkebunan sawit dan eksplorasi tambang; dan (2) konflik dengan negara, dimana lahirnya kebijakan daerah tentang pengakuan atas eksistensi Suku *Taa* masih belum berpengaruh terhadap kuasa pemodal (kapitalis) dan kepentingannya.

Setiap masyarakat/ suku yang mendiami suatu daerah memiliki hak untuk menjaga harmonisasi lingkungan hidup yaitu dengan mengelola alam sesuai dengan konsep yang mereka pahami secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Adanya kebijakan pemerintah terkait dengan perlindungan alam yaitu berupa konservasi sumber daya alam

semakin mempersempit ruang gerak masyarakat lokal dalam mengelola alam, ditambah lagi dengan hadirnya perusahaan-perusahaan dalam skala besar yang kemudian menguasai wilayah kekuasaan masyarakat lambat laun akan menyingkirkan masyarakat dari sarana produksinya yang selama ini menjadi tumpuan hidup mereka.

Karl Polanyi mengatakan bahwa dominasi kapitalisme selalu ada, sebab kapitalisme berkembang dari tuntutan kelas-kelas merkantilis baru serta kaum kelas borjuasi kepada negara untuk melindungi bisnis-bisnis baru dan status sosial mereka. Dengan begitu, pemerintah (negara) menjadi pelayan bagi kapitalisme, membantu memajukannya melalui perundang-undangan (kebijakan) yang diperlukan serta menjalankannya dengan kekuatan bersenjata (Polanyi, 2003: vii).

Senada dengan Noer Fauzi Rachman (2016:33), secara historis, kapitalisme di tanah air bersumber pada kehendak untuk menguasai tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah masyarakat non-kapitalis. Maka pada perkembangan kapitalisme di negara manapun, ia dimulai dengan dua perkembangan, yaitu (1) suatu proses penguasaan tanah dan segala sumber daya alam untuk akumulasi modal dan penciptaan buruh upahan; dan (2) kapitalis merampas tanah dan kekayaan alam bersama dengan masyarakatnya (non-kapitalis) untuk dimasukkan ke dalam satu formasi sosial yang memperluas corak produksi kapitalis untuk tumbuh dan berkembang.

Berdasarkan dua tujuan kapitalis itulah pemerintah dan segala perangkatnya (aparatur dan kebijakan) sering dimanfaatkan kapitalis untuk mencapai kepentingannya, sehingga pemerintah yang pro-kapitalis ini kemudian menjadi bagian penting dari formasi sosial tersebut. Meskipun Suku *Taa* boleh di bilang berada dalam "sedikit" lindungan kekuatan kebijakan negara, namun hal itu bukanlah akhir, melainkan sebagai landasan/alat menghadapi tantangan-tantangan besar dimasa mendatang.

4. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

4.1. Kesimpulan

Praktik-praktik sosial budaya Suku *Taa* berbentuk pola-pola sikap perilaku pemanfaatan hutan dan lahan yang sejalan dengan nilai-nilai pengetahuan lokalnya, seperti pembagian kawasan berdasarkan peruntukan dan kebutuhan komunal. Sementara kehidupan agraris yang nomaden menjadi ciri khas Suku *Taa* dimana pola itu dilandasi oleh nilai-nilai ekosentrisme yang lahir dari leluhur bahwa tanah adalah sumber kehidupan yang mesti dimanfaatkan untuk kebaikan bersama, meskipun di sisi lain mereka diperhadapkan dengan tekanan-tekanan struktural seperti tekanan swasta dan kebijakan yang belum sepenuhnya memihak mereka.

4.2. Implikasi Kebijakan

Kehidupan sahaja Suku *Taa* yang diperhadapkan dengan tekanan struktural dimana negara dan swasta justru menjadi ancaman bagi ruang hidup sehingga mengancam kehidupan tradisional mereka. Agar nilai-nilai sosial budaya dan aset vital (hutan dan tanah) mereka tetap eksis, maka implikasi kebijakan yang berkeadilan dan memihak serta pembangunan (pemberdayaan) yang berorientasi kesejahteraan komunitas sangat dibutuhkan untuk mempertahankan eksistensi Suku *Taa* agar tidak tamarjinalisasi tekanan struktur di zaman modern ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika. 2014. *Agar Alam, Modal dan Adat: Konsesionalisasi dan Eksklusi Wlayah Adat Tau Taa Wana Posangke Kab. Morowali Sulawesi Tengah*. Working Paper Sajogjo Institute. Vol. 1. Bogor: Sajogyo Institute.
- Camang, Nasution Camang. 2003. *Tau Taa Wana Bulang Bergerak Untuk Berdaya*. Palu: Yayasan Merah Putih.
- ICCAs. "Format Dokumentasi Kawasan Hutan/Lahan/Danau/Laut yang Dilindungi oleh Masyarakat Adat (ICCA)" Part I and Part II. Working Group in ICAs in Indonesia (WGII). Data Base (Document).
- Lauer, Robert H. 2003. *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasikun, 2009. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawalipers.
- Polanyi, Karl. 2003. *Transformasi Besar: Asal Usul Politik dan Ekonomi Zaman Sekarang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rachman, Noer Fauzi. 2016. *Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria: dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global*. Yogyakarta: InsistPress.
- Zaiful (Ed.), 2015. *Mengenal Komunitas Wana Posangke*. Palu: Yayasan Merah Putih Palu.